

EFEKTIVITAS DAN *BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS* TERHADAP KEBIJAKAN BOS PADA SMP NEGERI DI KECAMATAN BONANG

Maf' alul Izzah* dan Evi Yulia Purwanti

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

* Corresponding Email: mafalulizzh@students.undip.ac.id

ABSTRACT

The decline in the quality of the education sector prompted the government to intervene. To educate the nation in accordance with the mandate of the law, the government provides assistance in the form of school operational assistance. The purpose of this study was to determine the effectiveness and accuracy of the distribution of benefits from the BOS policy in public junior high schools in Bonang District. This study employs a quantitative descriptive method with four relevant indicators to assess effectiveness and uses the Benefit Incident Analysis (BIA) method to evaluate the distribution of benefits from the policy. Based on the results of the research conducted in public junior high schools in Bonang District, the program cannot be deemed effective. While the Flexibility and Accountability Indicators are considered effective, the Transparency Indicator remains ineffective. The distribution of benefits from the program is minimal, at only 9%, leading to the conclusion that the policy can be classified as regressive.

Keywords: Effectiveness, BOS, Benefit Incidence Analysis, and Government Spending.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.35192>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk potensi sebuah negara berkembang, diantaranya untuk penyerapan teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut UU No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam sistem pendidikan nasional menerangkan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ sosial selain itu warga negara yang tinggal didaerah terpencil atau terbelakang berhak memperoleh pendidikan secara khusus.

Dari total penduduk usia sekolah (7 – 18 tahun) di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta anak, berdasarkan analisa terhadap data Susenas 2017 diperkirakan 8% diantaranya tidak bersekolah. untuk populasi anak usia SMP/MTs diperkirakan ada 1,1 juta (8,3%) yang tidak bersekolah (Bappenas, 2019). Angka tersebut dirasa cukup tinggi karena di tingkat Dasar seharusnya pendidikan dapat dijangkau semua

lapisan masyarakat khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Hal ini tidak sesuai dengan program dari pemerintah mengenai slogan wajib belajar 9 tahun.

Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan dalam rangka pemerataan akses pendidikan berupa pemberian program Dana BOS yang merupakan dana bantuan untuk mendanai non personalia yang diberikan oleh semua siswa pada jenjang dasar, menengah dan atas. Kecamatan Bonang sebagai kecamatan paling miskin di Kabupaten Demak pada Tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 18.239 yang juga menerima Dana BOS dari pemerintah.

Tabel 1. Anggaran Dana BOS dan Fasilitas SMP di Kecamatan Bonang Tahun 2021

Tahun 2021/2022	SMP Negeri	SMP Swasta
Anggaran Dana BOS	Rp 1.754.400.000	Rp 590.400.000
Tenaga Pengajar	86	47
Ruang Kelas	53	21
Laboratorium	7	4
Rombongan Belajar	49	18
Perpustakaan	4	4
Sanitasi	16	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak (2021)

Anggaran yang diterima terkait Dana BOS, yang diberikan pada sekolah SMP di Kecamatan Bonang memiliki proporsi lebih besar pada sekolah negeri dibanding sekolah swasta hal itu sebanding dengan fasilitas yang diberikan di sekolah negeri juga lebih banyak dibandingkan di sekolah swasta.

Berdasarkan hasil dari Prasurvey, bantuan diberikan merata ke semua siswa yang bersekolah. rata-rata pendapatan orang tua siswa yaitu sebesar Rp 800.000 sampai Rp 1.340.000 per bulan. Dengan adanya Bantuan Dana BOS membantu masyarakat mengurangi beban, terutama bagi orang tua yang kurang mampu. Sumbangan (SPP) yang dahulu ditarik setiap bulanya setelah adanya Bantuan BOS, SPP tersebut tidak lagi ditarik. Orang tua siswa hanya membayar SPI/uang gedung untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp 600.000 dan uang LKS yang dibeli untuk menunjang pembelajaran di sekolah yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan besaran Rp 90.000 Sehingga orang tua siswa setiap bulanya mengeluarkan untuk biaya pendidikan sebesar Rp 281.000 sampai dengan Rp 335.0000.

Meskipun Dana BOS diberikan secara merata pada semua tingkat pendapatan seharusnya masyarakat yang memiliki berpendapatan rendahlah yang mendapat manfaat lebih banyak. Agar tujuan dan program pemerintah dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas penyaluran dana bantuan operasional sekolah, menganalisis peran pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat serta melihat progresivitas program Dana Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Kecamatan Bonang.

TINJAUAN PUSTAKA

Subsidi

Menurut Hyman (2014) subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan ataupun pihak swasta dengan tujuan untuk menurunkan harga dibawah harga pasar dengan cara membayarkan selisih dari harga riil dan harga yg dibayarkan masyarakat yang memenuhi kriteria, yang disebut juga dengan Price-Distorting Subsidies, yang membuat individu cenderung menukar komoditas bersubsidi dengan barang lain dalam anggaran tahunan mereka, yang mengakibatkan kerugian efisiensi (*ceteris paribus*).

Spencer & Amos (1993) menjelaskan subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah pengeluaran (output).

Pengeluaran Pemerintah

Secara makroekonomi menurut Dumairy (1996, hal. 157) menyebutkan, bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan keterlibatan campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara makro. Penurunan atau kenaikan dari pengeluaran pemerintah akan menurunkan atau menaikkan pendapatan nasional.

Dalam teori mikroekonomi dijelaskan bahwa, teori tentang pengeluaran pemerintah digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan terhadap barang publik dan faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap tersedianya barang publik

Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” Todaro (1993) menyebutkan bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa akan menentukan karakter dan kecepatan dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa itu, dan bukan modal fisik ataupun sumber daya material. Mekanisme kelembagaan yang pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal. Banyak negara-negara Dunia Ketiga telah digiring dan mempercayai bahwa perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif merupakan kunci utama menuju pembangunan nasional, semakin bertambah pendidikan, semakin cepat pembangunan

Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam buku panduan BOS (2021, hal. 3) yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini perhitungan biaya operasional non personalia dengan cara mempertimbangkan keragaman, kondisi satuan pendidik baik dari faktor-faktor eksternal maupun internal dari masing-masing sekolah

Penyaluran Dana BOS diberikan keseluruh sekolah baik swasta maupun negeri yang telah memenuhi syarat sebagai penerima Dana BOS. Berdasarkan Kemendiknas (2019) menetapkan satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah masing-masing daerah berbeda yaitu tergantung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah. Hal ini dilakukan karena melihat pada peraturan tahun sebelumnya pemberian biaya BOS masih kurang adil sehingga pemerintah merubah peraturan mengenai pembiayaan BOS sendiri. Terdapat 5 prinsip pengelolaan, Dana BOS diantaranya:

1. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada satuan pendidikan.
2. Efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi satuan pendidikan
3. Efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan penggunaan biaya seminimal mungkin namun dengan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan peraturan undang-undang.
5. Transparansi yaitu penggunaan Dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Efektivitas

Efektivitas yaitu pencapaian pada target output yang telah diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dapat dikatakan efektif ketika output seharusnya lebih besar dari output sesungguhnya (Schermmerhorn 1986). Champion Dean J (1981) dalam Basic Statistic For Statistical Reseach menyebutkan bahwa klasifikasi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. 0% - 24% berarti tidak efektif
2. 25% - 50% berarti sedikit efektif
3. 56% - 75% berarti cukup efektif
4. 75% - 100% berarti sangat efektif

Teori Pembagian Manfaat

Benefit Incidence Analysis (BIA) merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti efek dari kebijakan pajak atau subsidi pemerintah terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan kata lain BIA digunakan sebagai evaluasi distribusi subsidi pemerintah pada kelompok-kelompok berbeda dalam populasi khususnya kelompok masyarakat yang dibagi menurut kategori pendapatannya. Hasil BIA menjadi landasan untuk menentukan apakah program subsidi pemerintah sudah tepat sasaran, yakni manfaatnya diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau sebaliknya. Jika kelompok termiskin merupakan sasaran utama dari subsidi pemerintah hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat tersebut dan sebagian besar manfaatnya diterima oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi maka kebijakan pemerintah ini dapat digolongkan sebagai kebijakan yang gagal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan *Benefit Incidence Analysis* (BIA). Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan tiga indikator yaitu fleksibilitas, akuntabilitas dan transparansi

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua/wali murid dari siswa kelas VII, VIII, dan IX pada SMP negeri yang berada di Kecamatan Bonang. Jumlah populasinya adalah 1.462 siswa yang diambil dari tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan Bonang. Penentuan jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin dengan estimasi eror sebesar 10% sehingga dapat diketahui jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1.462}{1+1.462 (10\%)^2} \quad (1)$$

$$n = 93,59 \approx 94 \quad (2)$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang dapat diambil adalah 94 siswa. Kemudian pengambilan sampel didistribusikan ke 3 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Bonang, SMP Negeri 2 Bonang, dan SMP Negeri 3 Bonang dengan menggunakan teknik *proportional sampling*

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan juga kuesioner serta wawancara. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Kemudian pengumpulan data dengan kuesioner diberikan kepada orang tua atau wali murid yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri yang terpilih sebagai sampel. Sedangkan wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah untuk memperoleh keterangan secara rinci kondisi nyata penggunaan dana subsidi program Bantuan Operasional Sekolah

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan tiga indikator yaitu fleksibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Adapun indikator untuk mengukur efektivitas Dana BOS dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Tiga Pengukuran Dana BOS

Indikator	Kriteria
Fleksibilitas	Keterlibatan pengelolaan dana BOS apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Transparansi	Kemudahan dan keterbukaan dalam memperoleh informasi mengenai Dana BOS.
Akuntabilitas	Kepercayaan terhadap penyelenggara Dana BOS apakah dana BOS sudah digunakan sesuai dengan petunjuk dana BOS.

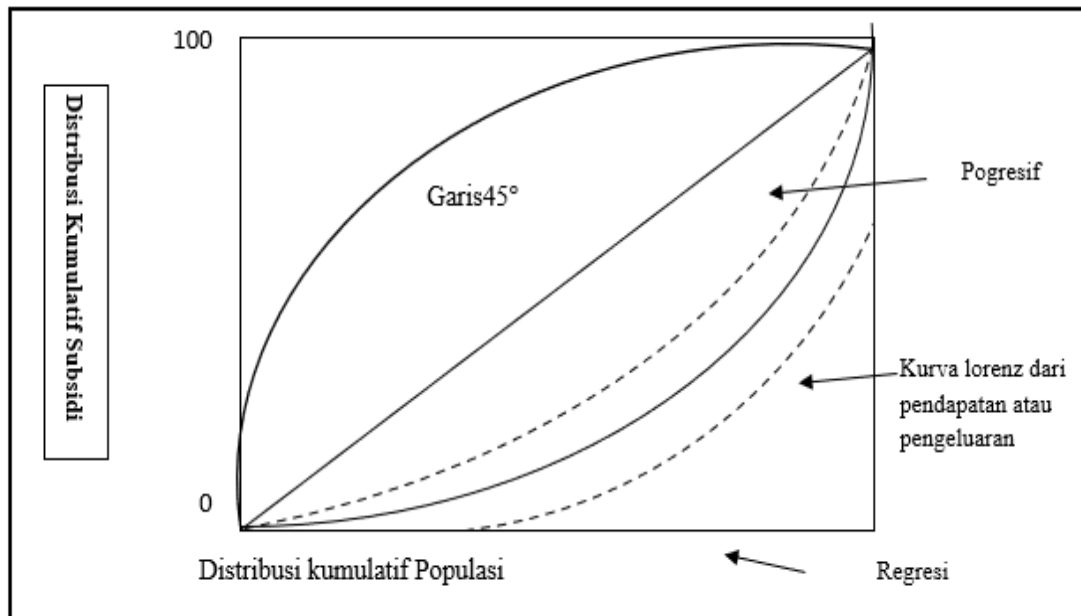
Metode *Benefit Incidence Analysis* fokus menganalisis apakah kebijakan pengeluaran pemerintah yang diberikan merupakan kebijakan yang progresif. Kebijakan progresif yaitu sebuah kebijakan yang dapat mendukung distribusi kesejahteraan masyarakat, sehingga BIA menggabungkan data biaya penyediaan dana bantuan untuk menilai distribusi manfaat dari pengeluaran pemerintah untuk

semua grup yang digolongkan berdasarkan pendapatan tersebut. Rumus yang digunakan dalam perhitungan *Benefit Incidence Analysis* adalah sebagai berikut (Demery, 2000, hal. 5) yaitu:

$$X_j \equiv \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^3 \frac{E_{ijk}}{E_i} \left(\frac{S_{ik}}{S} \right) \equiv \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n e_{ijk} S_{ik} \quad (3)$$

keterangan:

- X_j : nilai total subsidi Dana BOS yang dihubungkan dengan kelompok (j)
- E_{ijk} : mewakili sejumlah penerima Dana BOS yang terdaftar pada kelompok (j) pada tingkatan sekolah
- E_i : total jumlah Dana BOS (diantara semua kelompok) pada tingkat sekolah
- S_i : pengeluaran bersih pemerintah untuk program Dana BOS (i)



Gambar 1. Kurva Lorenz

Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam kurva Lorenz dan kurva konsentrasi pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kebijakan Bantuan Dana BOS dilatarbelakangi adanya terbit UU Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 dimana dilaksanakan desentralisasi penyerahan urusan pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/kota. Namun selama 4 tahun berjalanya waktu tahun 2004-2008 banyak sekolah di Indonesia yang tidak terurus dan kegiatan belajar mengajar berjalan seadanya. Sehingga orang tua dan masyarakat dibebankan dengan iuran yang tinggi, kemudian masyarakat dengan kondisi kurang mampu dibiarkan sehingga implikasinya kualitas pendidikan yang menurun.

Efektivitas program merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan program. Program dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan program tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penelitian ini difokuskan pada tiga indikator yaitu indikator fleksibilitas, indikator akuntabilitas, dan indikator transparansi.

Melalui survey dan wawancara responden pada SMP Negeri di Kecamatan Bonang terkait penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah mengenai efektivitas yang dilihat dari indikator Fleksibilitas terdapat 56% menjelaskan efektif, kemudian sebanyak 34% mengatakan kurang efektif serta hanya sebanyak 10% mengatakan tidak efektif. Dalam hal ini, dapat dilihat dari perspektif responden yang mengatakan bahwa sekolah tidak pernah memberikan sosialisasi terkait program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Dana BOS artinya bahwa orang tua tidak diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan program yang sedang berjalan. Namun dari pertanyaan yang diberikan perihal penarikan iuran atau dana di sekolah hampir 100% mengatakan bahwa sekolah tidak menarik dana diluar kebutuhan operasional sekolah. Hal ini sudah sesuai apa yang diharapkan pemerintah mengenai alokasi BOS dikelola untuk kebutuhan operasional sekolah sehingga efektivitas program BOS pada indikator fleksibilitas pada SMP Negeri di Kecamatan Bonang sudah masuk kategori efektif.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, jika transparansi sebagai keadaan yang dimana setiap orang yang mempunyai tanggungjawab dengan kepentingan. Hasil dari survey yang telah dilaksanakan terlihat efektivitas dari indikator Transparansi yaitu sebesar 58% responden mengatakan kurang efektif, kemudian sebanyak 41% responden mengatakan tidak efektif dan hanya 1% responden yang mengatakan efektif tingkat efektivitas pada indikator Transparansi Dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara orang tua/wali tidak pernah dilibatkan atau diberitahukan mengenai adanya bantuan Dana BOS sehingga banyak orang tua/wali yang kurang mengetahui bantuan Dana BOS tersebut. Seperti yang tertera pada aturan didalam Panduan Buku BOS 2021 disebutkan bahwa orang tua berhak mengetahui besaran anggaran dana yang telah digunakan, yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu jawaban responden tentang kesempatan didalam pemberian kritik dan saran terkait pelaksanaan Dana BOS, sebagian besar responden menjawab bahwa sekolah tidak pernah menyampaikan apapun tentang adanya Bantuan Operasional Sekolah sehingga orang tua tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran tersebut.

Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau mengenai kinerja dan tindakan dari pimpinan suatu organisasi. Terkait efektivitas dari indikator akuntabilitas yaitu tentang kepercayaan orang tua terhadap Dana BOS yang sudah diterima apakah dikelola secara jujur sehingga biaya tambahan yang dikeluarkan orang tua/wali sudah cukup minim atau cenderung mahal, secara keseluruhan jawaban responden adalah sekolah sudah melakukan atau melaksanakan penggunaan Dana BOS secara jujur karena biaya yang dikeluarkan oleh orang tua/wali cenderung sedikit sehingga orang tua cenderung terbantu dengan adanya Bantuan Dana BOS. Hasil survey efektivitas dari

indikator akuntabilis dapat dilihat bahwa sebanyak 91% responden mengatakan bahwa efektif, dan hanya 9% responden yang mengatakan kurang efektif.

Tabel 3. Presentase Tingkat Keefektifan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

No	Indikator	Efektif (%)	Tidak Efektif (%)	Total
1	Fleksibilitas	56	44	100
2	Transaparansi	1	99	100
3	Akuntabilitas	91	9	100
Total		49,3	50,7	100

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui hasil keseluruhan dari tiga indikator yang menentukan tingkat keefektifan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah yang diperoleh dari 100 responden yang menjadi sampel dari penelitian ini. Rata rata dari ketiga indikator yang efektif sejumlah 49,3 persen dan tidak efektif sejumlah 50,7 persen. Dari hasil persentase keseluruhan indikator, dapat terlihat bahwa persentase yang menyatakan efektif lebih kecil daripada yang tidak efektif. Selain itu, persentase efektifitas sejumlah 50,7 persen yang terdapat pada rentang kategori efektivitas 50-75 persen yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi Dana BOS termasuk dalam kategori cukup efektif.

Estimasi Pembagian Manfaat (*Benefit Incidence*)

Analisis pembagian manfaat program bantuan Dana BOS adalah gambaran umum tentang distribusi program bantuan Dana BOS tersebut dapat tersalurkan dengan tepat atau tidak. Hal ini dapat dilihat sehubungan dengan persepsi responden terhadap program bantuan Dana BOS selama ini. Ketepatan program bantuan Dana BOS diukur menggunakan pendekatan Benefit Incidence Analysis (BIA).

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan narasumber pada SMP Negeri di Kecamatan Bonang, dapat disimpulkan bahwa pembagian manfaat program bantuan Dana BOS dilakukan secara adil dan merata artinya bahwa semua masyarakat yang tergolong miskin sudah memperoleh bantuan Dana BOS di sekolah. Walaupun jika disesuaikan dengan garis kemiskinan rata-rata secara nasional menurut BPS tahun 2021 sebesar Rp2.187.756-/rumah tangga miskin/bulan, sebanyak 88% dari responden tidak termasuk dalam kriteria penerima, namun rata-rata pendapatan responden masih setara dengan UMK Kabupaten Demak Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.513.005. Secara keseluruhan pengalokasian Dana BOS sudah cukup baik jika dilihat dari kondisi pendapatan rumah tangga para responden.

Tabel 4. Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Quantile	Kelompok Pendapatan	BOS per Tahun	Nilai subsidi Dana BOS (Rp)	Presentase Manfaat
1	< Rp 1.000.000,00	12	7,200,000	6
2	Rp 1.000.000,00 - Rp 1.500.000,00	18	10,800,000	9
3	Rp 1.600.000,00 - Rp 2.500.000,00	62	37,200,000	31
4	Rp 2.600.000,00 - Rp 3.500.000,00	92	55,200,000	46
5	> Rp 3.500.000,00	16	9,600,000	8
Total		200	120,000,000	100

Sumber: Data Primer (2021), Diolah

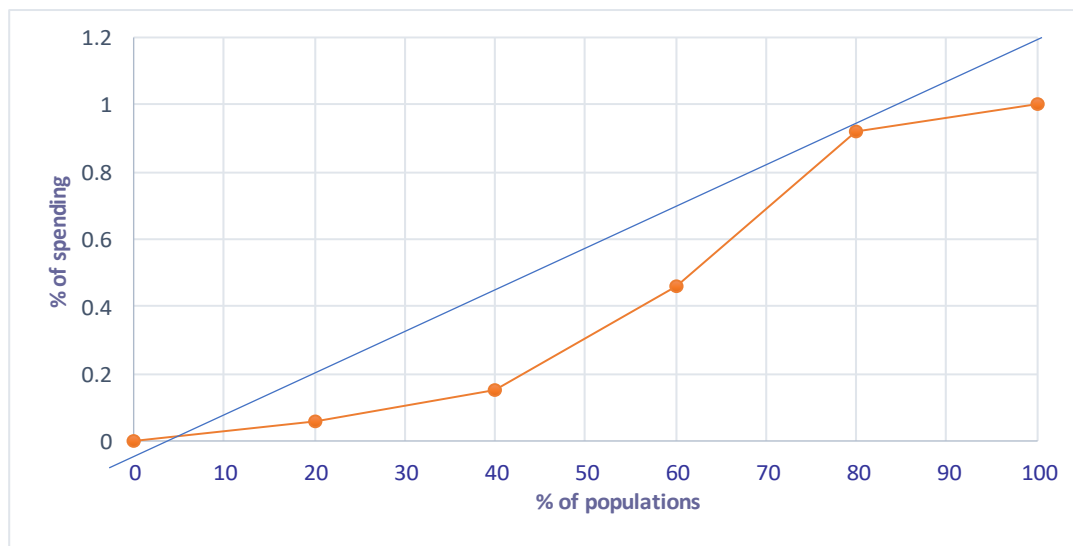
Menunjukkan bahwa titik pertama yang berada dibawah garis diagonal menunjukkan bahwa kelompok responden dengan pendapatan dibawah Rp 1.000.000

atau masyarakat miskin menerima manfaat sebesar 6 persen dari total program Dana BOS. Kelompok masyarakat dengan pendapatan terkecil tidak mendapat distribusi manfaat yang paling besar dari program subsidi ini. Kurva konsentrasi manfaat terletak dibawah garis diagonal 45 derajat maka 10 persen responden dengan kelompok pendapatan terkecil dalam populasi menerima kurang dari 10 persen manfaat subsidi sehingga distribusi manfaat dikatakan bersifat regresif.

Tidak jauh dari besarnya distribusi manfaat dari kelompok pendapatan sebelumnya, kelompok pendapatan yang ketiga yaitu responden dengan pendapatan antara Rp 1.500.000 sampai Rp 2.500.000 memperoleh distribusi manfaat sebesar 31 persen dari total Dana BOS. Meskipun seharusnya kelompok pendapatan ini tidak berhak menerima Dana BOS ini, namun, jika dilihat dari keadaan ekonomi di masa sekarang kelompok pendapatan ini tergolong kelompok pendapatan yang masih layak untuk menerima bantuan dari pemerintah karena memiliki pendapatan yang berada dibawah pendapatan UMP Kabupaten Demak.

Kelompok yang terakhir adalah kelompok pendapatan yang terbesar juga sebagai penerima distribusi manfaat program subsidi terbesar. Kelompok dengan pendapatan lebih dari Rp 3.500.000 menurut BPS adalah kelompok pendapatan yang sangat tinggi, namun kelompok pendapat ini memperoleh distribusi manfaat paling kecil dari Dana BOS nomer dua setelah kelompok pendapatan kurang dari Rp 1.000.000 dengan distribusi manfaat sebesar 8 persen.

Merujuk pada interpretasi dari Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi Dana BOS yang berjalan saat ini masih bersifat regresif, karena seluruh kelompok pendapatan dalam penelitian ini masih dititik yang berada dibawah kurva konsentrasi manfaat. Dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai kebijakan kali ini karena jika diteruskan bisa menjadi boomerang bagi pemerintah.



Gambar 2. Benefit Incidence Program Dana BOS pada SMP Negeri di Kecamatan Bonang

Lebih lanjut mengenai progresifitas dari Dana BOS hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Palupi (2015) yang menyimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Kebumen tidak terdistribusi dengan

baik. Masyarakat menengah keatas atau yang berpendapatan tinggi menikmati Dana BOS yang paling besar dibandingkan dengan masyarakat kurang mampu. Hal tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka meratakan wajib belajar 9 tahun. Dimana, masyarakat miskin menerima manfaat kurang dari 20% artinya bahwa distribusi bantuan masih kurang terdistribusi dengan baik.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Permana (2010) yang menyimpulkan bahwa belanja pendidikan sekolah menengah pertama diterima paling tinggi oleh kelompok termiskin atau masyarakat kurang mampu. Aditya Permana (2001) melakukan analisis BIA pada subsidi pendidikan di Kota Semarang dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja pendidikan dasar lebih bersifat progresif. Meskipun manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin masih kurang dari 20% dari total dana bantuan yang disediakan.

KESIMPULAN

Simpulan

Efektivitas program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diukur melalui tiga indikator, yaitu fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi survei dan wawancara di Kecamatan Bonang, sebanyak 56% responden menyatakan bahwa sekolah mampu mengelola Dana BOS sesuai dengan kebutuhan operasional, menunjukkan efektivitas dalam indikator fleksibilitas. Selain itu, 100% responden setuju bahwa sekolah tidak menarik dana di luar kebutuhan operasional, yang juga mencerminkan efektivitas program ini. Namun, pada indikator transparansi, situasinya berbeda. Dari 100 responden yang disurvei, hanya 1% yang merasa dilibatkan atau diberitahu mengenai adanya subsidi Dana BOS, sementara 99% tidak menerima informasi terkait, menandakan bahwa indikator transparansi ini tidak efektif. Di sisi lain, 91% responden menilai bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana BOS efektif, dengan mereka berpendapat bahwa fasilitas yang disediakan oleh sekolah cukup memadai, meskipun sebagian kecil, yaitu 9%, tidak setuju dengan penilaian ini. Secara keseluruhan, responden sepakat untuk menyerahkan tanggung jawab pengalokasian Dana BOS kepada pihak sekolah. Namun, perlu dicatat bahwa program BOS di SMP Negeri Kecamatan Bonang tergolong regresif, karena penerima Bantuan Operasional Sekolah dengan pendapatan di bawah Rp 1.000.000,00 hanya memperoleh manfaat program sebesar 6%.

Saran

Kepada pemangku kebijakan, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan, termasuk efektivitas pengelolaannya, karena program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih dikategorikan belum efektif. Salah satu perhatian utama adalah upaya memperbaiki kebijakan ini, terutama terkait dengan penerima Dana Bantuan Operasional. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan agar kebijakan ini dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Bagi penerima subsidi, disarankan untuk aktif bertanya kepada pihak sekolah agar dapat ikut serta dalam mengawasi kebijakan yang diterapkan, mengingat sebagian besar penerima merasa tidak menerima

manfaat dari program ini, yang menyebabkan tingkat kepedulian mereka cenderung rendah. Akibatnya, penggunaan dan pengalokasian dana masih kurang maksimal. Para pelaku pendidikan juga diharapkan dapat bersikap kooperatif dan terbuka, dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan observasi dan wawancara yang lebih mendalam kepada responden yang dipilih agar hasilnya lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, penggunaan metode lain seperti Metode Regresi Logistik dapat dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara variabel yang mempengaruhi ketepatan sasaran program ini, sehingga pemerintah dapat menjadikannya sebagai fokus dalam memperbaiki program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Champion, D. J. (1981). *Basic statistic for social research*. Macmillan Publishing.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Guritno, M. (1995). *Ekonomi publik* (3rd ed.). BPFE.
- Hyman. (2014). *Public finance: A contemporary application of theory to policy* (8th ed.). Thomson.
- Irawati. (2017). *Benefit incidence analysis terhadap bantuan operasional sekolah untuk siswa SMP Negeri di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Diakses pada 6 agustus 2021 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.
- Kemendikbud. 2021. *Buku Panduan BOS 2021*. Jakarta. Diakses pada 5 september 2021 dari <https://jdih.Kemendikbud.go.id>.
- Palupi, D. (2015). *Analisis pembagian manfaat (benefit incidence analysis) pada realisasi anggaran belanja pemerintah daerah sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen 2012* [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pamungkas, A. Y. (2021). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA Negeri di Kota Samarinda* [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Schermerhorn, J. R. (1986). *Management for productivity*. John Willey & Sons.
- Spencer, M. D. (1993). *Contemporary economics*. Worth Publisher.
- Todaro. (1993). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.